

**STRATEGI CHINA DALAM PENANGGULANGAN
PERDAGANGAN PEREMPUAN VIETNAM DI CHINA**

(Skripsi)

Oleh

INDAH DWI MUHARANI

1716071019



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

STRATEGI CHINA DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN VIETNAM DI CHINA

Oleh

INDAH DWI MUHARANI

China mengalami pertumbuhan yang tinggi hampir di setiap bidang seperti bidang militer dan ekonomi. Namun, di sisi lain China masih menghadapi masalah keamanan manusia khususnya individu yakni kejahatan perdagangan manusia. Salah satu bentuk perdagangan manusia yang banyak dan masih terjadi hingga saat ini di China ialah perdagangan perempuan dengan tujuan eksploitasi seksual dan pernikahan paksa, terutama di wilayah perbatasan seperti Provinsi Yunnan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perdagangan perempuan Vietnam yang terjadi di China dengan menggunakan konsep perdagangan manusia dan menganalisis strategi China dalam penanggulangan perdagangan perempuan Vietnam di China dengan menggunakan konsep strategi penanggulangan perdagangan manusia, yang mengacu pada empat aspek yakni *implementation*, *cooperation*, *research and evaluation*, dan *institutionalizing*. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, triangulasi data, dan menggunakan teknik analisis data yang memiliki tiga tahap yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai strategi yang telah dilakukan China terdapat pada dua aspek yakni *implementation* dan *cooperation*. Pada aspek *implementation*, strategi yang dilakukan China adalah menandatangani konvensi internasional, membuat undang-undang, kebijakan, dan rencana aksi nasional. Pada aspek *cooperation*, strategi yang dilakukan China adalah melakukan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bekerja sama dengan negara-negara kawasan, dan bekerja sama dengan negara yang warganya menjadi korban perdagangan perempuan di China.

Kata kunci: China, perdagangan perempuan, strategi, Vietnam.

ABSTRACT

CHINA'S STRATEGY IN OVERCOMING THE TRAFFICKING OF VIETNAMESE WOMEN IN CHINA

By

INDAH DWI MUHARANI

China is experiencing high growth in almost every field such as the military and economy. However, on the other hand, China still faces human security problems, especially individuals, namely the crime of human trafficking. One form of human trafficking that is common and still occurs today in China is the trafficking of women with the aim of sexual exploitation and forced marriage, especially in border areas such as Yunnan Province. This research aims to describe the trafficking of Vietnamese women that occurs in China using the concept of human trafficking and analyze China's strategy in dealing with trafficking in Vietnamese women in China using the concept of strategies for dealing with human trafficking, which refers to four aspects, namely implementation, cooperation, research and evaluation, and institutionalizing. The type of research used is descriptive qualitative using data collection techniques, data triangulation, and data analysis techniques which have three stages, namely data condensation, data presentation, and conclusion drawing.. The results of this research show that the various strategies that China has implemented are in two aspects, namely implementation and cooperation. In the implementation aspect, China's strategy is to sign international conventions, create laws, policies and national action plans. In the cooperation aspect, China's strategy is to collaborate between the central government and regional governments, cooperate with regional countries, and cooperate with countries whose citizens are victims of women trafficking in China.

Key words: China, strategy, Vietnam, women trafficking.

**STRATEGI CHINA DALAM PENANGGULANGAN
PERDAGANGAN PEREMPUAN VIETNAM DI CHINA**

Oleh

INDAH DWI MUHARANI

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi : **STRATEGI CHINA DALAM
PENANGGULANGAN PERDAGANGAN
PEREMPUAN VIETNAM DI CHINA**

Nama Mahasiswa : **Indah Dwi Muharani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716071019**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.

NIP. 19600416 198603 2 002

Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.

NIP. 19880717 202321 2 043

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.

NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.



Sekretaris : Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.



Penguji : Gita Karisma, S.I.P., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Juni 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 7 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Indah Dwi Muharani
NPM. 1716071019

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir pada tanggal 15 April 2000 di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Dedi Apriadi dan Ibu Evi Adeyani, A.Md.. Penulis merupakan adik dari kakak yang bernama Dzulmi Al-Fath. Penulis menempuh pendidikan formal di SDN 46 Prabumulih, lalu melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 2 Prabumulih, dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 3 Prabumulih.

Pada tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis mengikuti kegiatan untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kualitas diri. Penulis mengikuti dan menjalani aktivitas organisasi kekeluargaan di Ikatan Mahasiswa Sumatera Selatan Universitas Lampung (IKAM SUMSEL UNILA) sebagai Sekretaris Umum pada tahun 2018-2019. Kemudian, pada bulan Januari tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Kerta, Kabupaten Pesawaran selama 40 hari. Selanjutnya, pada bulan Juli tahun 2020 penulis juga melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. PLN Persero P3B UPT Tanjung Karang selama 40 hari. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT yang disertai usaha dan iringan doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Strategi China Dalam Penanggulangan Perdagangan Perempuan Vietnam di China”.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah: 6)

*“Cukuplah Allah sebagai penolong bagiku dan Dia adalah sebaik-baik
pelindung”*
(QS. Ali-Imraan: 173)

Pertolongan Allah tepat pada waktunya

*Jalani hidup dengan ikhlas dan sabar, gapai mimpi dengan ikhtiar dan doa,
apresiasi hasil dengan syukur*

Keajaiban datang kepada orang-orang yang mau berusaha dan terus berdoa

PERSEMBAHAN



**Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT.
Penulis persembahkan karya kecil ini untuk**

“Keluargaku”

Khususnya untuk Ibu dan Bapak, yang selalu memberikan energi positif kepadaku berupa doa, semangat, dan ketulusan untuk semua hal yang ku lalui. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sahabat dan teman yang selalu mendoakan dan mendukung demi kesuksesan dan keberhasilanku

Dan untuk diriku sendiri yang telah berjuang dan terus bertahan sampai hari ini

Serta
Almamater Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa memberikan jalan dan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi China Dalam Penanggulangan Perdagangan Perempuan Vietnam di China”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, kritik, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Swt., yang telah memberikan segala kemudahan dan pertolongan tiada hentinya kepada penulis, sehingga penulis dapat terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Dedi Apriadi dan Ibu Evi Adeyani yang merupakan penyemangat terbesar penulis. Terima kasih telah melahirkan, membesarkan, dan memberikan kasih sayang, cinta, doa, dukungan, dan nasihat kepadaku. Semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada kalian.
3. Untuk kakakku tersayang, Dzulmi Al Fath, telah memberikan semangat doa dan dukungan kepada penulis untuk terus menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
6. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan yang telah diberikan selama proses bimbingan skripsi.

7. Ibu Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan yang telah diberikan selama proses bimbingan skripsi.
8. Ibu Gita Karisma, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembahas. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan yang telah diberikan selama proses bimbingan skripsi.
9. Bapak Iwan Sulistyو, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan banyak ilmu, pelajaran, dan bantuan selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Debby, Tesya, Adel, Ayu, dan Tama. Terimakasih selalu mendoakan dan mendukung dalam segala keadaan, yang tak segan berbagi cerita suka maupun duka,
12. Sahabat-sahabat selama perkuliahan, Windy, Dinda, Ezra, Nadia, Muti, Mba Ella, Mba Sindy, Mba Fira, dan Mas Aji. Terimakasih atas canda tawa dan kenangan indah selama masa perkuliahan.
13. Teman-teman seperjuangan KKN di Desa Tanjung Kerta, Dini, Yoel, Ilham, Meli, Angel, dan Nisa. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pengajaran dan pengalaman selama 40 hari kebersamaan kita.
14. Rekan-rekan Jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
15. Almamater tercinta, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Juni 2024

Indah Dwi Muharani

NPM.1716071019

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR SINGKATAN.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penelitian Terdahulu.....	5
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Konseptual.....	10
2.1.1 Perdagangan Manusia.....	10
2.1.2 Strategi Penanggulangan Perdagangan Manusia	12
2.2 Kerangka Pikir.....	18
III. METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Fokus Penelitian	21
3.3 Jenis dan Sumber Data	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Teknik Analisis Data	23
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Perdagangan Perempuan Vietnam di China	27
4.2 Strategi Penanggulangan Perdagangan Perempuan Vietnam Oleh China.....	40
4.2.1 <i>Implementation</i>	41
4.2.2 <i>Cooperation</i>	52
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Simpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Isu-isu TOC.....	1
1.2 Negara di Kawasan Asia-Pasifik dengan Jumlah Korban Perbudakan Modern Tertinggi	2
1.3 Bentuk Perdagangan Manusia di China	3
4.1 Harga Jual Perempuan Vietnam ke Beberapa Provinsi di China	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pikir	19
4.1 Perempuan Korban Perdagangan Manusia di China.....	28
4.2 Peringkat Tier China per Tahun	30
4.3 Jumlah Populasi Laki-laki dan Perempuan di China	31
4.4 Kasus Perdagangan Perempuan Vietnam	33
4.5 Peta Provinsi Yunnan	34
4.6 Budaya Pernikahan di China	37
4.7 Profil Organisasi IPEC TICW	53
4.8 Aksi Kerja Sama China-Vietnam dalam Memberantas Perdagangan Perempuan.....	56
4.9 Pertemuan Menteri Keamanan Publik China-Vietnam	58

DAFTAR SINGKATAN

CIA	=	<i>Central Intelligence Agency</i>
COMMIT	=	<i>Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking</i>
HAM	=	Hak Asasi Manusia
ILO	=	<i>International Labour Organization</i>
IPEC-TICW	=	<i>the International Programme on the Elimination of Child Labour of the International Labour Organization - Trafficking in Children and Women</i>
LSM	=	Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	=	<i>Non-Governmental Organization</i>
OHCHR	=	<i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
PBB	=	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKC	=	Partai Komunis China
RRC	=	Republik Rakyat China
TOC	=	<i>Transnational Organized Crime</i>
TIK	=	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIP	=	<i>Trafficking in Persons</i>
MOU	=	<i>Memorandum of Understanding</i>
UNODC	=	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
UNDP	=	<i>United Nations Development Programme</i>
UNTC	=	<i>United Nations Treaty Collection</i>
UNIAP	=	<i>United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya perang dingin dan globalisasi yang kian meningkat, memungkinkan timbulnya *Transnational Organized Crime* (TOC). TOC merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh suatu kelompok kriminal dan terjadi di lintas batas wilayah, untuk mendapatkan keuntungan semata dengan memperdagangkan manusia, narkoba, senjata, organ manusia, dan kejahatan lainnya secara ilegal. Kemajuan infrastruktur dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta kemunculan internet pada abad ke-20 (Hiiurdeman, 2003), dimanfaatkan para pelaku kriminal untuk mengembangkan strateginya, dalam memperluas jangkauan dan jaringannya. TOC menjadi salah satu bisnis besar di dunia, pada tahun 2009 TOC diperkirakan menghasilkan \$870 miliar, nilai ini setara dengan 1,5% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global dan setara dengan 7% ekspor barang dagangan dunia (UNODC, 2024). TOC juga dapat mengancam keamanan manusia, menghambat perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat (Caballero, 2013). Berikut ini merupakan beberapa isu TOC yang marak terjadi hingga saat ini, karena tingginya permintaan (UNODC, 2024).

Tabel 1.1. Isu-isu TOC

No	Isu TOC
1.	Perdagangan ilegal senjata api
2.	Perdagangan ilegal obat-obatan terlarang
3.	Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi
4.	Perdagangan ilegal produk kesehatan palsu
5.	Perdagangan ilegal manusia
6.	Penyelundupan migran

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Salah satu isu TOC yang sangat mempengaruhi dan mengancam kehidupan manusia sebagai individu adalah kejahatan perdagangan manusia (Caballero, 2013). Kejahatan tersebut bukanlah isu yang baru dihadapi dunia. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), perdagangan manusia merupakan bisnis yang menguntungkan, berada diperingkat kedua setelah obat-obatan terlarang, bahkan lebih baik dari bisnis senjata (UNODC, 2021). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2003-2021 terdapat lebih dari 450.000 korban dan 300.000 pelaku perdagangan manusia (*trafficker*) yang terdeteksi di seluruh dunia (UNODC, 2022). Dalam hal ini, kejahatan perdagangan manusia tidak hanya terjadi di negara terbelakang dan berkembang, tetapi juga terjadi di negara maju seperti Republik Rakyat China (RRC) (Friesendorf, 2009). Berdasarkan laporan *Global Slavery Index 2023*, China termasuk ke dalam urutan negara di Kawasan Asia-Pasifik dengan jumlah korban perbudakan modern¹ tertinggi (Walk Free, 2023).

Tabel 1.2. Negara di Kawasan Asia-Pasifik dengan Jumlah Korban Perbudakan Modern Tertinggi

No	Negara	Estimasi jumlah korban perbudakan modern	Populasi
1.	India	11,050,000	1,380,004,000
2.	China	5,771,000	1,439,324,000
3.	Korea Utara	2,696,000	25,779,000
4.	Pakistan	2,349,000	220,892,000
5.	Indonesia	1,833,000	273,524,000
6.	Bangladesh	1,162,000	164,689,000

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

¹ Perbudakan modern mengacu pada situasi eksploitasi dimana seseorang tidak dapat menolak atau meninggalkannya karena mendapat ancaman, kekerasan, pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa bentuk perbudakan modern misalnya; kerja paksa, pernikahan paksa, perbudakan atau praktik perbudakan serupa, dan perdagangan manusia (Walk Free, 2023).

Sebagai negara maju, industri China mengalami pertumbuhan yang tinggi hampir di setiap aspek, diantaranya memiliki nilai PDB terbesar kedua di dunia senilai 17,9 triliun pada tahun 2022 (Worldbank, 2022), dan 1,5% dari nilai tersebut dialokasikan untuk kebutuhan bidang militer (CIA, 2022), China menyandang sebagai produsen senjata terbesar kedua di dunia (Sipri, 2020). United Nations Development Programme (UNDP) pun menyatakan bahwa pembangunan manusia di China telah mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan cepat. Selain itu, China juga memiliki populasi penduduk terbesar kedua di dunia sebanyak 1,4 miliar jiwa (Worldbank, 2022). Namun, di sisi lain China masih menghadapi permasalahan dalam keamanan manusia, khususnya individu yakni kejahatan perdagangan manusia. Berikut ini bentuk perdagangan manusia yang terjadi di China (Walk Free, 2024).

Tabel 1.3. Bentuk Perdagangan Manusia di China

No	Bentuk Perdagangan Manusia	Jenis Kasus	Asal Korban
1.	Kerja Paksa	Eksplotasi kerja paksa terhadap buruh pabrik, pertambangan, dan perikanan	Warga negara dan migran asing
		Eksplotasi seksual komersial terhadap orang dewasa (perempuan)	
		Eksplotasi seksual komersial terhadap anak	
2.	Pernikahan Paksa	Perdagangan pengantin	Warga negara dan migran asing
3.	Perdagangan Organ Tubuh	Pengambilan organ hidup	Warga negara

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan eksploitasi merupakan bentuk perdagangan manusia yang dilarang berdasarkan berbagai konvensi internasional dan aturan hukum di China. Namun, kasus kejahatan inilah yang banyak dan masih terjadi hingga saat ini di China. Sejumlah besar orang diperdagangkan lalu dipaksa untuk melakukan eksploitasi seksual komersial dan dinikahkan secara paksa, yang berakhir pada perbudakan (ILO, 2002). Sehingga para korban tidak dapat menentukan nasib dan kehidupan mereka sendiri (ILO, 2002). Perdagangan perempuan mulai meningkat bahkan merajalela pada abad ke-19 (ILO, 2002). Tahun 1989-1999 tercatat 10.000 perempuan Vietnam dikirim secara ilegal ke beberapa daerah perbatasan di China, seperti Provinsi Yunnan dan Guangxi, untuk dijadikan pengantin secara paksa (UNIAP, 2016). Adapun, laporan dari media menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir jumlah korban perdagangan pengantin dari Vietnam mencapai 100.000 perempuan yang dijual ke beberapa desa di perbatasan China. Sehingga, desa-desa tersebut mendapat julukan “*Vietnamese Bride Village*” (Liu, 2020). Dapat dilihat bahwa, bentuk dan korban dari kejahatan perdagangan manusia yang terjadi di China ialah perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual dan pernikahan paksa terutama di daerah perbatasan, salah satunya Provinsi Yunnan.

Provinsi Yunnan ditandai sebagai salah satu provinsi dengan jumlah permintaan paling tinggi terhadap perempuan dari Vietnam. Menurut Kementerian Keamanan Masyarakat Vietnam, perempuan asal Vietnam yang terdeteksi menjadi korban perdagangan pada tahun 2013-2019 mencapai 3.536 perempuan (Liu, 2020). Meskipun kasus perdagangan perempuan di China yang melibatkan korban dari warga negara asing telah ramai di perbincangkan di berbagai media. Namun, penelitian empiris yang membahas tentang perdagangan perempuan yang terjadi di China masih terbatas, karena sulitnya mendapatkan data primer tentang perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan Vietnam yang terjadi di China.

Perdagangan perempuan Vietnam yang terjadi di Provinsi Yunnan, China dipicu oleh empat hal utama. Pertama, disebabkan oleh kedekatan geografis karena Provinsi Yunnan berbatasan langsung dengan Vietnam, sehingga mempermudah para pelaku kejahatan perdagangan dalam melancarkan aksinya untuk mengirimkan dan menjual para korban perdagangan perempuan dari Vietnam ke pedesaan di Provinsi Yunnan dengan harga yang lebih murah (Liu, 2020). Kedua, demografis juga menjadi pemicu terjadinya perdagangan perempuan karena kurangnya populasi perempuan di Provinsi Yunnan (Liu, 2020). Ketiga, karena adanya praktik budaya pernikahan yang sudah menjamur dalam masyarakat China yakni, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memiliki rumah di kota atau apartemen dan membayar mertuanya dengan sejumlah uang yang besar sebagai “imbalan” karena telah mengambil anak perempuannya (Liu, 2020). Keempat, ekonomi juga sangat mempengaruhi terjadinya perdagangan perempuan karena Vietnam salah satu negara dengan tingkat ekonomi yang rendah. Oleh sebab itu, perempuan Vietnam ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak, kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam menjerat korban perdagangan perempuan (Liu, 2020).

Permasalahan diatas, penulis berupaya untuk mengeksplorasi perdagangan perempuan Vietnam di China untuk mengetahui dan memahami strategi yang dilakukan China untuk menanggulangi perdagangan perempuan Vietnam di China.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dan untuk menghindari terjadinya plagialisme dengan penelitian lainnya. Pada penelitian ini, penulis merujuk pada tujuh penelitian terdahulu sebagai bahan bacaan, referensi, dan informasi dalam penulisan yang

berkaitan dengan kejahatan perdagangan manusia yang terjadi di China.

Penelitian pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Yiwei (Xia, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pemetaan. Penelitian ini memberikan sudut pandang baru dalam analisis perdagangan manusia dengan mendigitalkan dan menganalisis dokumen putusan pengadilan terhadap perdagangan orang di Tiongkok periode 2014-2015. Dengan melakukan pemetaan data pengadilan terhadap informasi geografis dan melakukan analisis jaringan, penelitian ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai pola perdagangan manusia intra-provinsi, inter-provinsi, dan internasional. Data menunjukkan bahwa perdagangan internasional menjadi kategori perdagangan perempuan terbesar, dan korbannya adalah perempuan muda berusia sekitar 20 tahun yang berasal dari Vietnam, Myanmar, dan Korea Utara yang dijual ke beberapa provinsi pusat. Sementara didalam negeri, jumlah perdagangan inter-provinsi melebihi jumlah kasus perdagangan intra-provinsi.

Penelitian kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Zhen Wang (Wang, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, untuk mengidentifikasi dan menargetkan kota-kota utama dan jalur perdagangan manusia di China, karena terdapat puluhan ribu anak yang diperdagangkan setiap tahunnya, sehingga menyebabkan masalah bagi keluarga dan masalah sosial secara global. Penelitian ini juga mengusulkan strategi baru untuk mencegah perdagangan dan adopsi anak secara ilegal.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Geping Qiu (Qiu, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, untuk menganalisis 189 kasus pernikahan paksa yang melibatkan 536 perempuan Vietnam yang diperdagangkan ke Tiongkok periode 2014-2015. Data menunjukkan bahwa, korban perdagangan manusia memiliki berbagai

latar belakang, sebagian besar berpendidikan rendah dan tidak memiliki pekerjaan. Sementara, pelaku perdagangan manusia didominasi oleh warga negara Tiongkok, yang memiliki koneksi baik dengan perdagangan lintas batas.

Penelitian keempat adalah penelitian yang ditulis oleh Anqi Shen (Shen, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dalam menganalisis profil dasar pelaku dan korban perdagangan anak, serta mendeskripsikan cara pelaku beroperasi. Data menunjukkan bahwa pelaku perdagangan perempuan merupakan pemain handal dalam jaringan perdagangan anak.

Penelitian kelima adalah penelitian yang ditulis oleh Miranti Kusuma Astari (Astari, 2019). Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menjelaskan upaya Pemerintah Tiongkok dalam mengatasi kasus *bride trafficking*, karena meningkatnya kasus *bride trafficking* akibat dari *one child policy*, kemudian pemerintah memutuskan untuk merubah kebijakan tersebut menjadi *two child policy*. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, pemerintah Tiongkok berusaha untuk menurunkan jumlah perdagangan manusia yang telah merugikan berbagai pihak dan memperbaiki kualitas hidup seluruh penduduknya.

Penelitian keenam adalah penelitian yang ditulis oleh Yusnarida Eka Nizmi (Nizmi, 2016). Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memaparkan kejahatan kemanusiaan yang saling berkaitan yakni perdagangan dan penyelundupan orang yang terjadi di China. Tiga hal utama yang dijabarkan dalam penelitian ini ialah; 1) menganalisa penyebab dan dampak dari kejahatan perdagangan dan penyelundupan orang; 2) mengkaji kejahatan perdagangan manusia di Provinsi Fujian dan Yunan; 3) membahas upaya serius Pemerintah China untuk mengatasi perdagangan dan penyelundupan manusia.

Penelitian ketujuh yakni penelitian yang ditulis oleh Ariella A. Yoteni (Yoteni, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini membahas sejauh mana upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani *Mail Order Brides* (MOB) antara Indonesia dan China sebagai bagian dari perdagangan manusia. Data menunjukkan bahwa, Indonesia telah menjadi negara asal, transit, dan tujuan para korban selama bertahun-tahun. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia efektif dalam menyelesaikan kasus MOB, dimana hampir 80% dari total kasus yang dilaporkan pada tahun 2015 hingga 2019 berhasil diselesaikan. Namun, dalam menyelesaikan kasus tersebut, pemerintah Indonesia juga menghadapi tantangan, salah satunya adalah pemerintah Tiongkok yang kurang berkerja sama dan perbedaan pandangan dalam kasus MOB.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dan penelitian terdahulu yakni, menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan ketujuh penelitian terdahulu di atas. Pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pembahasan terkait strategi China dalam penanggulangan perdagangan perempuan Vietnam di China. Dalam menganalisis permasalahan yang ada, penulis menggunakan dua konsep yakni, perdagangan manusia dan strategi penanggulangan perdagangan manusia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini berfokus untuk menjawab pertanyaan, bagaimana strategi China dalam penanggulangan perdagangan perempuan Vietnam di China?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan perdagangan perempuan Vietnam di China.
2. Menganalisis strategi penanggulangan perdagangan perempuan yang dilakukan China.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu Hubungan Internasional mengenai isu keamanan, khususnya perdagangan manusia dan menambah wawasan pembaca mengenai strategi China dalam penanggulangan perdagangan perempuan Vietnam di China.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau masukan bagi pemerintah China dan semua pihak yang terlibat dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual akan digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua konsep utama yakni konsep perdagangan manusia dan strategi penanggulangan perdagangan manusia. Penjelasan mengenai konsep perdagangan manusia berisi definisi, dan akar penyebab terjadinya perdagangan manusia. Selanjutnya, penjelasan mengenai konsep strategi penanggulangan perdagangan manusia berisi definisi dan strategi yang mengacu pada empat aspek yakni, *implementation*, *cooperation*, *research and evaluation*, dan *institutionalizing*. Konsep tersebut menjadi landasan teoritis dan acuan dalam proses penelitian yang dibutuhkan oleh penulis agar topik yang dibahas tidak melenceng dari pembahasan dan penulis dapat lebih memahami permasalahan yang diteliti.

2.1.1 Perdagangan Manusia

Cornelius Friesendorf dalam bukunya menjelaskan bahwa sejak pertengahan tahun 1990an kejahatan perdagangan manusia terus menjadi agenda keamanan internasional yang harus diperhatikan, karena kejahatan ini memakan banyak korban dan terjadi di banyak negara. Berdasarkan kondisi tersebut Friesendorf mendefinisikan perdagangan manusia sebagai seseorang yang dipindahkan melintasi batas negara atau dalam suatu negara untuk tujuan perbudakan atau penghambaan. Perdagangan manusia ditandai dengan adanya perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang yang disertai dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, atau cara lainnya yang dilakukan

untuk mengeksploitasi seseorang (Friesendorf, 2009). Unsur-unsur definisi ini diambil dari Pasal 3 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 15 November 2000, yang berbunyi;

“Perdagangan manusia adalah, perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, ataupun bentuk-bentuk pemaksaan lainnya seperti, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, dengan tujuan untuk eksploitasi. Eksploitasi termasuk, prostitusi atau bentuk kekerasan seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, atau praktik-praktik perbudakan lainnya, atau pengambilan organ tubuh” (Friesendorf, 2009).

Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), akar penyebab terjadinya perdagangan manusia di setiap negara berbeda-beda. Namun, secara umum perdagangan manusia terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yakni, faktor ekonomi, budaya, sosial, dan lainnya (UNODC, 2008). Terdapat beberapa bentuk perdagangan manusia, salah satunya ialah perdagangan perempuan. Menurut, Mary C. Burke perdagangan perempuan dikategorikan sebagai perdagangan manusia, karena korban perdagangan perempuan melibatkan anak perempuan dan perempuan untuk dinikahkan secara paksa baik secara usia matang maupun usia dini dengan laki-laki yang bukan pilihannya. Kemudian, mereka hidup sebagai pembantu laki-laki dan sering mengalami kekerasan fisik atau seksual di lingkungan rumah (Burke, 2013).

Adapun, Aronowitz dan Koning menambahkan definisi perdagangan perempuan ialah termasuk ke dalam perdagangan manusia yang terdapat aktifitas penjualan perempuan dari wilayah satu ke wilayah lainnya dengan tujuan menikah atau eksploitasi seksual (Aronowitz, 2014).

Konsep perdagangan perempuan memandang perdagangan perempuan Vietnam di China sebagai salah satu bentuk perdagangan manusia yang melintasi batas negara dengan tujuan mengeksploitasi seseorang seperti dinikahkan secara paksa. Berdasarkan data yang ditemukan, tahun 1989-1999 tercatat 10.000 perempuan Vietnam dikirim secara ilegal ke beberapa daerah perbatasan di China, seperti Provinsi Yunnan dan Guangxi, untuk dijadikan pengganti secara paksa (UNIAP, 2016).

Penelitian ini mengacu pada definisi perdagangan manusia menurut Friesendorf dan definisi perdagangan perempuan menurut Burke. Penggunaan konsep dianggap relevan untuk menjelaskan perdagangan perempuan Vietnam di China.

2.1.2 Strategi Penanggulangan Perdagangan Manusia

Menurut Cornelius Friesendorf untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia tidak dapat terpaku pada penguatan satu aspek saja, seperti penegakan hukum secara ketat. Sehingga pemberantasan kejahatan perdagangan manusia dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Strategi penanggulangan perdagangan manusia ini hadir sebagai bentuk evaluasi, karena melihat sistem pemberantasan perdagangan manusia secara global masih banyak memiliki kekurangan, terutama dalam hal penerapan (Friesendorf, 2009).

Friesendorf menyatakan bahwa strategi penanggulangan perdagangan manusia yang lebih baik bergantung pada kemajuan dalam empat aspek. Pertama *implementation*, yakni dibutuhkan implementasi kebijakan yang lebih sistematis. Kedua *cooperation*, yakni jaringan pemberantasan perdagangan manusia harus lebih tersembunyi dan terkoordinasi dengan lebih baik. Ketiga *research and evaluation*, yakni para pelaku pemberantasan perdagangan manusia harus memprioritaskan pada penelitian mengenai perdagangan manusia untuk menilai dampak positif maupun negatif dari upaya mereka. Keempat *institutionalizing* yakni negara, organisasi internasional, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertugas untuk menciptakan dan berpartisipasi dalam institusi yang kuat dan independen (Friesendorf, 2009).

Adapun penjelasan dari keempat aspek tersebut antara lain (Friesendorf, 2009):

1. *Implementation*

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan adanya kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Kebijakan harus dilaksanakan ke dalam praktik nyata di lapangan agar memiliki dampak yang dapat dinilai baik dan buruknya. Dalam mengatasi perdagangan manusia, sejumlah kondisi telah menghambat implementasi kebijakan, beberapa diantaranya bersifat teknis, seperti kurangnya penelitian, tidak terdeteksinya aktivitas perdagangan manusia, dan terus berkurangnya perlindungan hak asasi manusia yang diberikan pada korban perdagangan manusia.

Wujud implementasi dapat dilihat dari adanya negara yang mengimplementasikan kebijakan, seperti mengadopsi hukum

internasional kedalam hukum nasional, menandatangani konvensi, dan membuat rencana aksi nasional. Buku ini menjelaskan bahwa implementasi perjanjian penanggulangan perdagangan manusia masih belum efektif pada umumnya. Sejak 1990, pemerintah telah membentuk suatu instrumen dalam penanggulangan perdagangan manusia baik dalam skala global, regional, dan nasional. Pada pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan, terlihat dari kegagalan negara dalam meratifikasi perjanjian internasional, kegagalan untuk menerjemahkan perjanjian internasional menjadi hukum nasional, ataupun kegagalan negara dalam mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengadopsi dengan efektif. Adanya keterhambatan dalam mengimplementasikan hukum internasional tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan aktor keamanan dalam mengetahui korban perdagangan manusia. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan pada aktor keamanan, seperti penjaga perbatasan dan polisi untuk mengidentifikasi korban perdagangan manusia; polisi, jaksa dan hakim perlu mengetahui cara untuk mewawancarai korban setelah teridentifikasi; dan aktor penegakan hukum dan peradilan pidana membutuhkan pelatihan untuk bekerja sama lebih baik satu sama lain.

Idealnya, pelatihan tersebut akan membantu para aktor sektor keamanan untuk memahami kompleksnya definisi dari perdagangan manusia sebagaimana yang telah ditata dan direncanakan dalam Protokol Palermo². Namun secara umum, buku ini menjelaskan bahwa negara telah menghasilkan banyak *output*, seperti membuat

² Protokol Palermo adalah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak. Protokol ini dirancang guna memperkuat dan meningkatkan kerja sama internasional untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia, serta sebagai payung hukum untuk perlindungan korban perdagangan manusia.

undang-undang anti perdagangan manusia, rencana aksi dalam penanggulangan perdagangan manusia, serta satuan kepolisian khusus yang bekerja dalam penanggulangan perdagangan manusia.

2. *Cooperation*

Kerja sama dinilai sebagai aspek yang sangat penting untuk dilakukan oleh para aktor dalam penanggulangan perdagangan manusia. Misalnya, kerja sama antar *Non-Governmental Organization* (NGO), kerja sama internasional, atau kerja sama di antara aktor sektor keamanan yang berfokus pada pencegahan dan perlindungan seperti penjaga perbatasan, polisi, dan lain-lain. Tanpa kerja sama yang lebih baik, perdagangan manusia akan terus berkembang. Oleh karena itu, untuk memerangi masalah yang kompleks ini, maka dibutuhkan juga koalisi nasional dan internasional yang kompleks serta kerja sama dari sejumlah aktor. Penanggulangan perdagangan manusia menyatukan para petugas polisi, penjaga perbatasan, jaksa penuntut, ahli pembangunan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karyawan perusahaan transportasi, resepsionis hotel, dan banyak lainnya.

Kerja sama yang lebih baik akan menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Sehingga, para korban perdagangan manusia maupun para aktor yang sudah bekerja keras akan merasakan dampak positif dari kerja sama yang baik.

3. *Research and Evaluation*

Dalam melakukan penanggulangan perdagangan manusia terdapat banyak hambatan, seperti kelangkaan informasi tentang ruang lingkup, jenis perdagangan, dan modus operasi perdagangan manusia. Hal ini disebabkan oleh sifat perdagangan manusia yang terselubung dan transnasional, stigma sosial yang melekat pada

perdagangan manusia, kurangnya definisi yang mendukung operasionalisasi, upaya pengumpulan data yang tidak koheren, dan hambatan lainnya. Upaya untuk lebih memahami sifat masalah telah dilakukan, namun banyak yang masih belum diketahui.

Kurangnya *research and evaluation* disebabkan karena kurangnya data primer, serta fakta bahwa lembaga-lembaga tidak ingin mendapat kritik. Banyak uang telah dihabiskan dan banyak alat kebijakan telah diterapkan, tetapi hanya sedikit yang diketahui tentang dampak dari upaya penanggulangan perdagangan manusia. Negara harus menyediakan lebih banyak dana yang digunakan untuk melakukan penelitian tentang perdagangan manusia yang membantu meningkatkan informasi mengenai kejahatan perdagangan manusia. Tanpa penelitian atau riset, pembuat kebijakan tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana harus bertindak.

4. *Institutionalizing*

Implementation, networking, dan evaluation akan ditingkatkan melalui pembangunan institusi. Institusi akan membantu para aktor bergerak dari solusi *zero-sum* (dimana keuntungan dari satu aktor adalah kerugian bagi yang lain) menjadi keuntungan absolut (dimana semua aktor bekerja sama untuk meningkatkan nasib semua orang). Institusi berusaha mengurangi hambatan dalam kerja sama dengan memfasilitasi kepercayaan dan berbagi informasi. Hal tersebut juga dapat dipraktekkan dengan jaringan yang terdiri dari aktor negara, para-negara, dan non-negara.

Negara, organisasi internasional, dan LSM bertugas untuk menciptakan dan berpartisipasi dalam institusi yang kuat dan

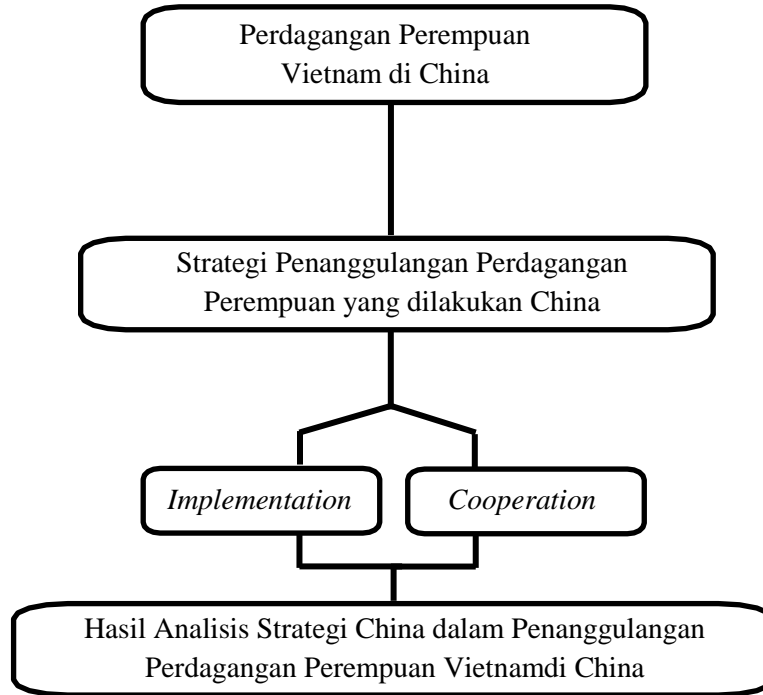
independen. Staf dalam setiap institusi harus dapat memutuskan informasi apa yang akan dipublikasikan dan bagaimana mempublikasikannya. Dalam hal ini, pendekatan pun dilakukan dengan *clearing house* yang mengumpulkan dan menyebarluaskan data dan informasi mengenai ruang lingkup dan jenis perdagangan di berbagai negara; perubahan rute dan metode perdagangan manusia; faktor-faktor yang membuat individu rentan menjadi korban; profil para pelaku perdagangan manusia; konvensi internasional, hukum nasional, dan rencana aksi nasional; daftar dan tautan website mengenai materi pelatihan penanggulangan perdagangan manusia; nomor telepon *hotline* penanggulangan perdagangan manusia; dan penilaian strategi penanggulangan perdagangan. Hanya institusi yang kuat yang akan memiliki peluang untuk meningkatkan implementasi, kerjasama, dan evaluasi. Untuk menciptakan institusi seperti itu, dibutuhkan lebih banyak tekanan publik, dan banyak waktu.

Konsep strategi penanggulangan perdagangan manusia digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini, bertujuan untuk melihat bagaimana strategi China dalam penanggulangan perdagangan perempuan di China. Namun, pada penelitian ini data yang ditemukan oleh penulis terkait strategi China dalam penanggulangan perdagangan perempuan di China terdapat pada dua aspek strategi penanggulangan yakni *implementation* dan *cooperation*. Strategi China dalam menanggulangi kejahatan tersebut akan dilihat berdasarkan dua aspek yakni *implementation* dan *cooperation*, sehingga kita dapat mengetahui apa saja strategi yang dilakukan China pada dua aspek tersebut, dan akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab Pembahasan.

2.2 Kerangka Pikir

Kejahatan perdagangan manusia bukan hanya terjadi di negara terbelakang dan berkembang, tetapi juga terjadi di negara maju. Sebagai negara maju, China mengalami pertumbuhan yang tinggi hampir di setiap aspeknya, seperti aspek militer dan ekonomi. Namun, di sisi lain China masih menghadapi masalah keamanan terhadap individu yakni kejahatan perdagangan manusia. Salah satu bentuk perdagangan manusia yang banyak dan masih terjadi hingga saat ini China ialah perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan yang terjadi di China bukan hanya lintas batas wilayah (domestik) tetapi sudah lintas batas negara, yang telah melibatkan korban dari negara asing seperti Vietnam, Myanmar, dan Korea Utara. Perempuan-perempuan tersebut diperdagangkan ke China terutama di wilayah-wilayah perbatasan seperti Provinsi Yunnan, dengan tujuan eksploitasi seksual komersial dan pernikahan paksa. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 1989-1999 tercatat 10.000 perempuan Vietnam dikirim secara ilegal ke beberapa daerah perbatasan di China seperti Provinsi Yunnan dan Guangxi, untuk dijadikan pengantin secara paksa (UNIAP, 2016). Kejahatan inipun memakan banyak korban setiap tahunnya, dapat dilihat dari jumlah korban, menurut Kementerian Keamanan Masyarakat Vietnam, korban perempuan asal Vietnam yang terdeteksi pada tahun 2013-2017 mencapai 3.000 perempuan (Rani, 2022). Karena kondisi tersebut, penting untuk penulis mengetahui strategi apa yang dilakukan China untuk menanggulangi perdagangan perempuan Vietnam di China. Berdasarkan uraian masalah diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua konsep yakni, konsep perdagangan manusia yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa perdagangan perempuan Vietnam di China, dan konsep strategi penanggulangan perdagangan manusia dengan dua aspek yakni *implementation* dan *cooperation* yang digunakan untuk menganalisis strategi China dalam penanggulangan perdagangan perempuan Vietnam di China.

Adapun kerangka berpikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Sumber : Diolah oleh Penulis, 2024.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini ditentukan oleh keputusan penulis dan didukung oleh kesesuaian teori, konsep, dan data yang tersedia untuk menjelaskan strategi China dalam menanggulangi kejahatan perdagangan perempuan Vietnam di China. Creswell menyatakan bahwa sebuah penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok dapat dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2013). Penelitian kualitatif dapat juga didefinisikan sebagai teknik penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang penulis untuk menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheran. Penekanan pendekatan kualitatif lebih mengarah kepada eksplanasi rinci dan berfokus pada proses penelitian. Selain itu, pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan beragam alat dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang ada dalam bentuk bahasa lisan atau tertulis dan tidak diformalkan menjadi angka (Lamont, 2015).

Penulis memandang jenis penelitian ini relevan untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat yakni menganalisis penerapan strategi China dalam penanggulangan perdagangan perempuan Vietnam di China. Adapun eksplorasi terhadap data-data dalam bentuk lisan yang tertulis menjadi hal penting dan menghasilkan temuan pengetahuan tentang strategi China dalam menanggulangi perdagangan perempuan Vietnam di China.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi penanggulangan perdagangan manusia China terhadap perdagangan perempuan Vietnam di China dan dianalisis menggunakan dua konsep. Pertama, konsep perdagangan manusia memandang perdagangan perempuan Vietnam di China sebagai salah satu bentuk perdagangan manusia yang melintasi batas negara dengan tujuan untuk mengeksploitasi seseorang. Berdasarkan data yang ditemukan, korban perdagangan manusia yang terjadi di China bukan hanya berasal dan diperdagangkan dalam negeri saja, namun melibatkan pelaku dan korban dari negara lain, seperti Vietnam, Kamboja, Korea Utara, dan Myanmar. Vietnam merupakan negara dengan korban perdagangan manusia paling banyak diantara negara lainnya (Situmeang, 2019). Pada tahun 1989-1999 tercatat sekitar 10.000 perempuan Vietnam, dikirim secara ilegal ke beberapa daerah perbatasan di China, seperti Provinsi Yunnan dan Guangxi, untuk dinikahkan secara paksa dengan laki-laki yang bukan pilihannya (UNIAP, 2016). Kemudian, pada tahun 2018 terdapat 1.207 perempuan Vietnam direkrut, dikirim, dan dijual sebagai pengantin ke negara-negara, salah satunya ke China, untuk memberikan layanan seksual kepada suami mereka (Situmeang, 2019). Penggunaan konsep ini dinilai sangat relevan, karena konsep perdagangan manusia digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan perdagangan perempuan Vietnam di China.

Kedua, konsep strategi penanggulangan perdagangan manusia digunakan untuk menganalisis bagaimana strategi China dalam penanggulangan perdagangan perempuan Vietnam di China. Strategi China dalam menanggulangi kejahatan tersebut dilihat berdasarkan dua aspek. Pertama, *implementation* untuk menjelaskan kebijakan yang telah dibuat China, mengadopsi hukum internasional kedalam hukum nasional, menandatangani konvensi internasional, dan membuat rencana aksi nasional. Kedua, *cooperation* untuk menjelaskan kerja sama yang dilakukan China dengan

berbagai aktor untuk menanggulangi perdagangan perempuan di China.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Teknik triangulasi data memiliki empat tipe triangulasi, diantaranya triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi metodologis (Ismail, 2019). Penelitian ini menggunakan tipe triangulasi yang pertama, yakni triangulasi data. Triangulasi data, dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber data yang berbeda. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa studi dokumen sebagai sumber data. Alan Bryman mengategorikan dokumen menjadi beberapa jenis seperti, dokumen resmi negara, dokumen resmi organisasi, laporan resmi, publikasi, jurnal, hingga sumber daring terpercaya lainnya (Bryman, 2019). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yakni laporan resmi pemerintah, laporan resmi organisasi internasional, dan penelitian dari akademisi dalam e-book dan jurnal-jurnal ilmiah. Berikut merupakan sumber laporan resmi pemerintah yang didapatkan dan digunakan oleh penulis; laporan UNIAP, laporan USA. Selanjutnya, sumber dari laporan resmi organisasi internasional; laporan World Bank, laporan CIA, laporan UNDP, laporan SIPRI, dan dokumen UNTC, dokumen dan laporan ILO, dokumen dan laporan UNODC. Kemudian, sumber dari para akademisi berupa e-book dan jurnal-jurnal ilmiah, misalnya dalam tulisan yang berjudul *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector* dan *Illicit Enterprising Activities and the Trafficking of Vietnamese Women in China*. Adapun, sumber dari media internasional yang digunakan sebagai sumber data pendukung dalam penelitian ini. Berbagai sumber data tersebut digunakan dalam penelitian, untuk memperkaya data pada penelitian, dan pemilihan sumber-sumber tersebut didasari pada kredibilitas sumber yakni, publikasi data resmi dan laporan yang telah melalui riset.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan triangulasi data. Triangulasi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber data yang berbeda. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa studi literatur sebagai sumber data.. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang sesuai dengan topik penelitian (Danial dan Wasriah, 2009). Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan penelitian berbasis internet. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa dokumen resmi, dokumen sekunder, dan laporan media. Tentunya dokumen-dokumen tersebut tidak diproduksi secara khusus sehingga dapat digunakan untuk penelitian sosial dan dapat dianalisis. Selain pengumpulan data berbasis dokumen, penulis juga menggunakan pengumpulan data berbasis internet dengan mengumpulkan informasi faktual tentang topik atau informasi atas peristiwa tertentu yang dapat mendukung penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis sekunder data kualitatif dengan menggunakan proses analisis data dari Miles dan Huberman. Analisis sekunder data kualitatif merupakan penggunaan data yang sudah ada untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang berbeda dari pertanyaan yang diajukan dalam penelitian asli. Penggunaan analisis sekunder memungkinkan untuk memperoleh data tambahan atau untuk mengejar temuan yang muncul dari analisis awal. Menurut Lisa Harrison dan Theresa Callan, analisis sekunder bukan hanya sekadar mengutip penelitian yang sudah ada, tetapi juga menyiratkan analisis ulang terhadap data tersebut.

Proses analisis data yang penulis gunakan ialah proses analisis data dari Miles dan Huberman. 2014. Menurutnya, terdapat tiga tahap dalam menganalisis data yaitu:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data atau pemadatan data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, atau transformasi data yang muncul dalam korpus, dengan catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Proses analisis ini dapat membuat data lebih kuat. Karena kondensasi data, terjadi ketika penulis akan memutuskan kerangka konseptual, kasus, pertanyaan penelitian, dan pendekatan, serta pengumpulan data mana yang harus dipilih. Semua keputusan tersebut merupakan pilihan analitik. Pada saat melakukan pemilihan data, penulis menyesuaikan data yang diperoleh tersebut dengan fokus penelitian yang dalam hal ini adalah strategi China dalam penanggulangan perdagangan perempuan Vietnam di China. Selain itu, penulis juga menyesuaikan dengan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Inilah yang membuat kondensasi data tidak terpisah dari analisis dan merupakan bentuk analisis yang dapat menajamkan, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi kesimpulan akhir.

2. Penyajian data

Penyajian data atau dapat disebut juga *display* juga tidak dapat dipisahkan dari analisis. Proses ini mengacu pada penampilan data dalam bentuk kronologis, variabel konsep, situasi, kasus serta menampilkan data-data dalam bentuk tabel, grafik atau eksplanasi dari data-data yang ada. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi atau data, ke dalam bentuk yang ringkas dan dapat diakses dengan cepat, serta lebih terorganisir. Sehingga penulis dapat melihat apa yang terjadi dan menarik

kesimpulan atau melanjutkan ke langkah analisis berikutnya berdasarkan tampilan data.

Pada tahap ini, penulis melakukan penyusunan data-data dan informasi yang diperoleh. Selanjutnya, data-data tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi, seperti gambaran umum kondisi perdagangan perempuan yang terjadi di China, pemicu terjadinya perdagangan perempuan Vietnam di Provinsi Yunnan, berbagai strategi yang dilakukan China dalam penanggulangan perdagangan perempuan, dan deskripsi data-data terkait lainnya. Selain itu, data-data yang telah penulis pilih juga disajikan dalam bentuk table, gambar, dan grafik yang menginterpretasikan kondisi perdagangan perempuan Vietnam yang terjadi di China dan strategi China dalam penanggulangan perdagangan perempuan di China dengan melihat daftar negara dengan jumlah kasus perdagangan manusia tertinggi di kawasan Asia-Pasifik, bentuk perdagangan manusia yang terjadi di China, korban dan wilayah perdagangan perempuan di China, berbagai strategi penanggulangan strategi yang dilakukan China.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan jalinan sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data dalam bentuk paralel, untuk menganalisis. Pada bagian ini, penulis memaparkan temuan dari data yang telah disajikan terkait strategi China dalam penanggulangan perdagangan perempuan Vietnam di China. Selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dalam penelitian.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Kasus perdagangan manusia yang terjadi di China terus mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan masuknya China dalam kategori Tier 3 selama enam tahun terakhir. Karena banyaknya dan tingginya kasus perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan di China, sehingga berdampak pada perdagangan lintas batas negara, yang menyebabkan korban dari negara asing, khususnya korban perempuan dari Vietnam yang diperdagangkan ke beberapa wilayah di China, salah satunya Provinsi Yunnan. Kondisi ini disebabkan karena empat aspek yakni, geografis, demografis, budaya, dan ekonomi. Dari keempat pemicu tersebut, demografis dan ekonomi yang paling mempengaruhi masih terjadinya perdagangan manusia di China hingga saat ini, khususnya perdagangan perempuan Vietnam di China. Demografis, karena kurangnya populasi perempuan di China yang merupakan dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah China yakni, *one child policy*. Aspek ekonomi, karena daerah tujuan dan daerah asal korban merupakan daerah perbatasan yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Perempuan China yang tinggal di daerah perbatasan, seperti Provinsi Yunnan lebih memilih untuk bermigrasi ke kota, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, sehingga populasi di daerah tersebut semakin sedikit. Sementara, perempuan yang berasal dari Vietnam dapat menjadi korban perdagangan manusia, karena melihat China sebagai negara dengan perekonomian yang lebih maju dibanding Vietnam, sehingga mereka ingin bermigrasi ke China. Keinginan tersebut malah dimanfaatkan oleh *trafficker* untuk menjerat mereka sebagai korban perdagangan.

Karena kasus perdagangan manusia terus meningkat, tentunya China melakukan berbagai strategi untuk menanggulangi permasalahan tersebut, khususnya perdagangan perempuan Vietnam di China. Adapun, strategi yang telah dilakukan China terdapat pada dua aspek yakni, *implementation*, *cooperation*. Meskipun, strategi yang telah dilakukan China dalam dua aspek tersebut, namun telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penanggulangan perdagangan perempuan Vietnam di China, terutama aspek *Cooperation*, karena pada aspek ini China melakukan kerja sama dengan berbagai pihak; kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, organisasi internasional yakni ILO, negara-negara kawasan, dan bekerja sama secara langsung dengan negara korban yakni Vietnam, sehingga dalam memberantas kejahatan perdagangan jauh lebih efektif dan efisien. Untuk itu, penulis menyimpulkan bahwa China tidak hanya berdiam diri dengan adanya kejahatan perdagangan perempuan yang terjadi di negaranya dan telah melibatkan korban dari negara asing. China telah berupaya dengan untuk menanggulangi perdagangan perempuan yang terjadi di negaranya, dengan melakukan berbagai strategi, khususnya pada aspek *implemetation* dan *cooperation*.

5.2 Saran

Pada penelitian tentang strategi China dalam menanggulangi perdagangan perempuan Vietnam di China, penulis berusaha menganalisis strategi tersebut dan mendeskripsikan perdagangan perempuan Vietnam di China. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini baik dari segi teoritis maupun analisis yang belum tereksplorasi. Penulis berharap penelitian ini dapat membantu menyempurnakan penelitian serupa. Hal baru lainnya yang mungkin bisa digali lebih dalam oleh penulis selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap strategi yang dilakukan oleh China maupun Vietnam dalam menanggulangi perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan Vietnam di China.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Alexis, Aronowitz., & Koning, Anneke (2014). *Understanding Human Trafficking as a Market System: Addressing the Demand Side of Trafficking for Sexual Exploitation*. Eres.
- A. Yoteni, Ariella. (2021). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations, Volume 1*. <https://media.neliti.com/media/publications/408740-upaya-pemerintah-indonesia-dalam-menanga-875c4e26.pdf>
- Agence France Presse. (2004). *Two sentenced to death for human trafficking in Southwest China*. Paris: AFP
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BBC News Indonesia. (2018). *Kofi Annan, mantan Sekjen PBB tutup usia di usia 80 tahun*. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45233959>
- BBC News Indonesia. (2023). *Kasus perempuan korban perdagangan manusia gemparkan China, dirantai dan dipaksa melahirkan delapan kali*. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czvw5g1zyj1o>
- B.Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd edition)*. California: Sage Publications.
- Bryman, A., & Bell, E. (2019). *Social research methods (Fifth Canadian edition)*. New York: Oxford University Press.
- Caballero, Mely, & Anthony Alistair D. B. Cook. (2013). *Non-Traditional Security in Asia*. Pasir Panjang : ISEAS Publishing.
- C. Burke, Mary. (2013). *Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives*. New York: Routledge.
- China Daily. (2017). *Tiongkok dan Vietnam menyatakan perang terhadap penyelundup manusia*. China Daily. https://www.chinadaily.com.cn/world/2017-05/26/content_29504290.htm
- CNN Indonesia. (2017). *China Selamatkan Korban Perdagangan ‘Pengantin’ Vietnam*. [cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170209155736-113-192389/china-selamatkan-32-korban-perdagangan-pengantin-vietnam](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170209155736-113-192389/china-selamatkan-32-korban-perdagangan-pengantin-vietnam)

- CNN Indonesia. (2021). *Sensus: China Punya 30 Juta Pria Lajang yang Cari Istri*. [cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210525153312-277-646784/sensus-china-punya-30-juta-pria-lajang-yang-cari-istri](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210525153312-277-646784/sensus-china-punya-30-juta-pria-lajang-yang-cari-istri)
- CNN Indonesia. (2022). *Bagaimana Peran Perempuan di Partai Komunis China Era Xi Jinping*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221018142955-113-862134/bagaimana-peran-perempuan-di-partai-komunis-china-era-xi-jinping/2>
- Cresswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication.
- Danial dan Wasriah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Detik News. (2012). *Jual Gadis Muda ke China, 6 Warga Vietnam Ditahan*. [Detik.com. https://news.detik.com/internasional/d-1872097/jual-gadis-muda-ke-china-6-warga-vietnam-ditahan](https://news.detik.com/internasional/d-1872097/jual-gadis-muda-ke-china-6-warga-vietnam-ditahan)
- Dullum, Annie. (2009). *Human Trafficking in the People's Republic of China. Human Rights and Human Welfare*. Vol.9: Iss. 1, Article. 26. <https://digitalcommons.du.edu/hrhw/vol9/iss1/26>
- Eka Nizmi, Yusnarida. (2016). *Memahami Problematik Kejahatan Transnasional: Perdagangan dan Penyelundupan Orang di Cina. Hubungan Internasional. Universitas Riau*. <http://dx.doi.org/10.18196/hi.2016.0087.67-77>
- The State Council The People's Republic of China. (2023). *China, Vietnam pledge to strengthen law enforcement cooperation*. [english.gov.cn. https://english.www.gov.cn/news/202309/14/content_WS65024536c6d0868f4e8df697.html](https://english.www.gov.cn/news/202309/14/content_WS65024536c6d0868f4e8df697.html)
- Friesendorf, Cornelius. (2009). *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector*. Vienna : National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2011). *Qualitative Research Methods*. London:Sage Publication Ltd.
- Human Development Reports. (2019). *National Human Development Report 2019:China*. New York : UNDP.
- Hurdeman, Anton A. (2003). *The Worldwide History of Telecommunications*. Hoboken : Wiley Interscience.
- International Labour Organization. (2002). *International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)*. Bangkok : ILO.

- International Labour Organization. (2004). *Memorandum of Understanding on Cooperation against Trafficking in Persons in the Greater Mekong Sub-Region*. Yangon : ILO
- Ismail Suardi Wekke, dkk. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. KulonProgo : Gawe Buku.
- Kusuma Astari, Miranti. (2019). Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Bride Trafficking. *Hubungan Internasional*. Universitas Airlangga. https://repository.unair.ac.id/82012/3/JURNAL_Fis.HI.08%2019%20Ast%20u.pdf
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Realtions*. Thousand Oaks: Sage Publications Inc.
- Liputan 6. *Mahar Mahal, Pria China Harus Bayar Rp 622 Juta Untuk Menikah*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3232102/mahar-mahal-pria-china-harus-bayar-rp-622-juta-untuk-menikah>
- Liu, Weidi, Geping Qiu, Sheldon X. Zhang. (2020). Easy Prey: Illicit Enterprising Activities and the Trafficking of Vietnamese Women in China. *Springer Nature B.V.* <https://doi.org/10.1007/s11417-020-09327-y>
- NBC News. (2022). *Xi Jinping secures historic third term as a leader of China*. NBC News. <https://www.nbcnews.com/news/world/xi-jinping-china-third-term-rcna53539>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2024). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979*. ohchr.org. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>
- Puspita Rani, Ayu, Dr. Dra. Reni Windiani, M.S., Anjani Tri Fatharini, S.IP., M.A. (2022). Upaya Pemerintah Tiongkok Melalui Kerja sama Internasional Dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Pengantin (Bride Trafficking). Departemen Hubungan Internasional. Universitas Diponegoro. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/36123/27800>
- Qiu, Geping, Sheldon X. Zhang, & Weidi Liu. (2019). Trafficking of Myanmar women for forced marriage in China. *Springer Nature B.V.* <https://doi.org/10.1007/s10611-019-09826-9>
- Ramadhianti, Tya, Waworuntu, Adrianus Laurens Gerung. (2019). Dampak kebijakan dua anak dalam kurun waktu 2 Tahun (2015-2017) bagi kehidupan rakyat Cina. *Universitas Indonesia Library*. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20493882&lokasi=lokal>
- Shen, Anqi. (2016). Female Perpetrators in Internal Child Trafficking in China: An Empirical Study. *Journal of Human Trafficking*, 2:1, 63-77. <https://dx.doi.org/10.1080/23322705.2016.1136537>

- Stockholm International Peace Research Institute. (2020). *New SIPRI data reveals scale of Chinese arms industry*. Stockholm : SIPRI.
- The Global Review. (2022). Mao Zedong. The Global Review. <https://theglobal-review.com/power-struggle-berulang-di-cina/mao-zedong/>
- The World Bank. (2021). *Population, total – China*. Washington, DC : Worldbank.
- The World Bank. (2021). *GDP – China*. Washington, DC : Worldbank.
- The World Factbook. (2021). *Military Expenditures*. Langley : CIA.
- The World of Chinese. (2021). *My Mom Was a Vietnamese Bride*. The World of Chinese. <https://www.theworldofchinese.com/2021/04/vietnamese-bride-sold-into-marriage-in-china/>
- United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking. (2016). *UNIAP CHINA :The Trafficking Situation in China*. UNIAP.
- United Nations Office On Drugs And Crime. (2004). *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto*. New York : UNODC.
- United Nations Office On Drugs And Crime. (2008). *Addressing the root causes of trafficking*. New York : UNODC.
- United Nations Office On Drugs And Crime. (2009). *Combating Trafficking In Persons A Handbook For Parliamentarians*. New York : UNODC.
- United Nations Office On Drugs And Crime. (2021). *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. New York : UNODC.
- United Nations Office On Drugs And Crime. (2022). *Global Report on Trafficking in Persons 2022 Special Points of Interest*. New York : UNODC.
- United Nations Office On Drugs And Crime. (2024). *Transnational Organized Crime*. UNODC. <https://www.unodc.org/toc/en/crimes/organized-crime.html>
- United Nations Treaty Collection. (2003). *12. a Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, New York, 15 November 2000*. New York : UNTC.
- United States Department of State. (2021). *Trafficking In Persons Report*. Washington, DC : USA.gov.
- United States Department of State. (2017). *Human Trafficking & Migrant Smuggling: Understanding The Difference*. Washington, DC : USA.gov.
- Universitas Lampung. (2020). *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Bandar Lampung: UNILA.
- Walk Free. (2023). *The Global Slavery Index 2023*. Nedlands: walkfree.org.

- Walk Free. (2024). *Global Slavery Index*. Nedlands: walkfree.org. <https://www.walkfree.org/global-slavery-index/country-studies/china/>
- Wang, Zhen, Liyuan Wei, Sha Peng, Liangchun Deng, & Beibei Niu. (2018). Child-trafficking networks of illegal adoption in China. *Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature*.
- Xia, Yiwei, Yisu Zhou, Li Du, & Tianji Cai. (2019). Mapping Trafficking of Women in China: Evidence from Court Sentences. *Journal of Contemporary China*.